



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : SEKRETARIAT JENDERAL DPD-RI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAN HADI
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 210202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.498.860.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.312.865.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 415.890.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 61 m2/52 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 247.900.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 306.485.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 181.000.000
7. Tanah Seluas 453 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
8. Tanah Seluas 610 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 193.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/100 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/40 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.900.000
11. Tanah Seluas 8580 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 285.400.000
12. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL



- SENDIRI Rp. 70.500.000
13. Tanah Seluas 134 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.800.000
 14. Tanah Seluas 2360 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
 15. Tanah Seluas 369 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.700.000
 16. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
 17. Tanah Seluas 15000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
 18. Tanah dan Bangunan Seluas 14 m²/28 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 53.620.000
 19. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
 20. Tanah Seluas 16950 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 604.800.000
 21. Tanah Seluas 35000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
 22. Tanah Seluas 3000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
 23. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m²/30 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
 24. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
 25. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m²/59 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
 26. Tanah Seluas 6700 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
 27. Tanah Seluas 5000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
 28. Tanah Seluas 800 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
 29. Tanah Seluas 12000 m² di KAB / KOTA PESAWARAN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

110.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.



110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	213.000.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	152.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.973.860.000
III. HUTANG	Rp.	240.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.733.860.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.